

## **PERTARUNGAN KEKUASAAN DALAM TEKS MEDIA (Studi Analisis Wacana Kritis: Kasus Mesuji dalam Koran Jawa Pos)**

Mujianto  
Politeknik Negeri Malang

### **ABSTRAK**

Media masa merupakan arena pertarungan kekuasaan. Hal ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana legitimasi kekuasaan, sekaligus pula sebagai kontrol wacana publik. Namun, pada sisi lain media masa juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan, sekaligus bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kekuasaan tandingan. Oleh sebab itu, berita di media tidak pernah netral, selalu terdapat maksud dan tujuan tertentu. Terkait dengan pemberitaan kasus Mesuji oleh media cetak Jawa Pos, dapat diidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, bentuk, dan strategi pertarungan kekuasaan yang ada. Dengan menggunakan pisau AWK (Analisis Wacana Kritis), dapat diketahui pihak yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan adalah Jawa Pos, Polri, masyarakat Mesuji dan sekitarnya, dan TPGF (Tim Gabungan Pencari Fakta). Demikianlah bentuk pertarungan kekuasaan keempat pihak tersebut berbeda-beda.

Kata kunci: teori belajar kognitif, proses belajar mengajar, kegiatan belajar, ranah cipta, ranah rasa, ranah karsa

Sebagaimana diketahui, media masa memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, antara lain adalah sebagai sarana informasi, hiburan, dan pendidikan. Media masa telah mengubah pola kehidupan manusia. Pada awalnya manusia menempatkan media hanya sebagai pengisi waktu 'senggang', sekarang menempatkan media massa dalam jadwal utama. Kegiatan membaca koran, majalah, *browsing internet*, dan menonton televisi merupakan kegiatan utama seseorang sebelum melakukan kegiatan lain. Jalaludin Rakhmat (1997:235-242 dalam Anang, 2006:70) bahkan menyebutkan, bahwa media televisi adalah sebagai institusi informasi yang menjadi 'Tuhan Pertama' dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Media masa merupakan sarana yang paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada publik, baik oleh individu, kelompok, maupun instansi pemerintah. Melalui media, baik secara perorangan maupun kolektif dapat membangun persepsi kepada pihak lain. Di

samping sebagai alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, media massa juga mampu berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, bahkan menjadi kelompok penekan atas suatu gagasan yang harus diterima pihak lain (Sobur, 2009:31). Media memiliki andil besar dalam menjelaskan peristiwa dan bagaimana peristiwa itu dimaknai dan dipahami oleh masyarakat (Hall, 2007:31).

Terkait dengan strategisnya media masa dalam masyarakat, pada tahun 1960 di Amerika telah dilakukan studi tentang pentingnya media. Hasilnya, media masa dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kepentingan yang berbeda oleh masyarakat yang pluralis sehingga dapat mencapai titik persamaan atau ekuilibrium. Penelitian tersebut pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap Frankfurt, yang berpandangan bahwa media memiliki peran besar dalam memanipulasi kesadaran dan kenyataan. Menurutnya pula, media masa hanya

dimiliki dan didominasi oleh kelompok dominan dalam masyarakat, dan menjadi sarana untuk meneguhkan kelompok dominan, sekaligus memarginalkan kelompok minoritas (Eriyanto, 2011:22-23).

Berita dalam media terdapat perbedaan antara paham pluralis dengan paradigma kritis. Menurut paradigma pluralis, wartawan dan media masa adalah entitas yang otonom, sehingga berita yang dihasilkan haruslah menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Sementara itu, paradigma kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Menurutnya, posisi tersebut mempengaruhi berita, sehingga berita yang muncul bukanlah realitas yang sesungguhnya. Lebih jauh lagi paradigma kritis berpendapat, bahwa hasil liputan berita mempunyai ciri (1) cerminan ideologi wartawan dan kepentingan sosial, ekonomi, atau politik tertentu, (2) tidak objektif, karena wartawan adalah bagian dari kelompok/struktur sosial tertentu yang lebih besar, (3) bahasanya menunjukkan bagaimana kelompok sendiri diunggulkan dan memarginalkan kelompok lain (Fairclough, dalam Eriyanto, 2011:31-33)

Paradigma kritis memandang media masa bukanlah sebagai entitas yang bebas nilai. Media merupakan alat bagi kelompok yang dominan untuk menguasai dan memarginalkan kelompok yang tidak dominan. Media masa membantu kelompok dominan menyebarkan gagasannya, mengontrol kelompok lain, dan membentuk konsensus antar anggota komunitas. Lewat media, ideologi yang dominan, baik yang buruk maupun yang baik, dapat dimapkan (Eriyanto, 2011:36).

Menurut Bennett (1982:288), media masa dipandang sebagai agen suatu konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Jadi dengan demikian, media bukan sarana yang netral yang menampilkan kekuatan dan kelompok dalam masyarakat apa adanya, tetapi kelompok dan ideologi yang dominan itulah yang akan tampil dalam pemberitaan.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, dalam media masa terdapat apa yang disebut dengan bias berita. Hal tersebut dikarenakan media tidak berada dalam ruang

yang vakum. Media masa sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Menurut Louis Althusser (1971, dalam Al Zastrouw, 2000), sebuah media dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi yang sangat strategis, karena kemampuannya sebagai sarana legimitasi. Media masa merupakan bagian alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (*ideological states apparatus*).

Pendapat Althusser ini dianggap oleh Gramsci (1971 dalam Al zastrouw, 2000) mengabaikan resistensi ideologis dari kelas subordinasi dalam ruang media. Bagi Gramsci media masa merupakan arena pertarungan ideologi yang saling berkompetisi. Hal ini, berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legimitasi, sekaligus sebagai kontrol wacana publik. Namun, pada sisi lain media masa juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi yang dominan bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus bisa juga menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

Berdasarkan berbagai kemungkinan peran yang dapat dimainkan itu, media masa merupakan sebuah kekuatan raksasa yang sangat diperhitungkan. Dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, media sering ditempatkan sebagai variabel determinan. Bahkan, media masa dalam posisinya sebagai institusi informasi dapat dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses perubahan sosial budaya dan politik (Sobur, 2009:36). Menurut Karl Deutsch (dalam Effendy, 2000:325) media masa sebagai institusi informasi dapat menjadi 'urat nadi pemerintah'. Menurutnya, hanyalah orang yang mempunyai akses informasi yang kuat, yang bakal menguasai percaturan kekuasaan. Artinya, 'urat nadi pemerintahan' sebenarnya berada di jaring-jaring informasi.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana media menjalankan praktik kekuasaannya tersebut, penggunaan bahasa menjadi unsur penting untuk diamati. Hal ini

mengacu pada pernyataan Hidayat yang mengatakan bahwa pemanfaatan bahasa dalam media masa antara lain bisa diamati dalam wacana media (*media discourse*). Beliau kemudian menulis, “Media masa adalah salah satu arena sosial tempat berbagai kelompok sosial dan politik dengan bahasa yang mereka kembangkan sendiri. Mereka berusaha menampilkan definisi situasi, atau definisi realitas, versi mereka sendiri pula, yang paling sah bagi mereka”. Hal tersebut dilakukan melalui politik bahasa yang dikembangkan oleh masing-masing kelompok sosial yang terlibat.

### Bahasa dalam Berita

Berita merupakan representasi dunia dalam bahasa. Karena bahasa adalah kode semiotik, maka bahasa menentukan struktur nilai, sosial, dan ekonomis terhadap yang direpresentasikan. Jadi berita adalah representasi dalam pengertian konstruksi. Berita bukanlah refleksi fakta yang ‘bebas nilai’. Menurut Fowler (1991: 1 dalam Anang, 2006:74), berita adalah praksis, yakni sebuah wacana yang jauh dari refleksi realitas sosial dan fakta empiris yang netral. Dalam berita terjadilah campur tangan dalam konstruksi realitas sosial. Selanjutnya, Fowler (dalam Anang, 2006:75) berpendapat bahwa pilihan bentuk linguistik tertentu dalam teks berita –leksikalisasi atau *wording* terhadap pilihan sintaksis, pilihan struktur teks, dan sebagainya– memiliki alasan masing-masing. Pilihan ini bukan kebetulan dan bukan arbitraris. Pilihan yang dilakukan memiliki perspektif tertentu, agenda tertentu, dan ideologi tertentu. Dengan demikian benarlah apa yang dikatakan Tuchman, bahwa berita pada dasarnya adalah realitas yang telah dikonstruksikan (Sudibyo, Hamad, Qodri, 2001:65). Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah siapa yang ikut terlibat dalam pertarungan kekuasaan, bagaimana bentuk dan strategi pertarungan kekuasaan yang ada dalam media?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan kajian terhadap teks media. Dalam hal ini lingkup kajian ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu teks dalam media masa, media massa, dan periode pemberitaan. Teks dalam media menurut kajian ini adalah teks berita dalam media tertentu yang memuat kasus/pertistiwa Mesuji dan sekitarnya. Dengan demi-

kian, teks berita yang tidak berisi kasus Mesuji dan sekitarnya tidak menjadi lingkup kajian ini. Sementara itu, media masa yang dimaksud dalam kajian ini adalah media masa cetak yang memberitakan kasus Mesuji dan sekitarnya yang berskala nasional, yang dibaca hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini, media masa cetak dibatasi pada koran ‘Jawa Pos’. Pemilihan media tersebut karena telah memenuhi kriteria yang dimaksud. Selanjutnya, periode pemberitaan yang dimaksud dalam kajian ini adalah masa pemberitaan oleh media masa kasus Mesuji dan sekitarnya sejak awal diberitakan sampai dengan akhir Desember 2011.

### Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah konsep penting dalam setiap kajian fenomena sosial. Kekuasaan amat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kekuasaan sering diwujudkan melalui bahasa, bahkan dilaksanakan melalui bahasa. Bahasa digunakan oleh si kuat untuk mendominasi si lemah. Pengaruh kekuasaan itu tampak mulai dari hubungan pribadi antar dua orang sampai hubungan yang luas dalam sistem kenegaraan dan organisasi dunia. Dalam dialog antarpribadi, misalnya, mengapa seseorang sedikit melakukan pengambilan giliran (*turn-taking*), salah satu penyebabnya adalah persoalan kekuasaan. Dalam relasi antar-negara, mengapa Amerika Serikat memperoleh hak-hak istimewa dalam pelbagai pengambilan keputusan, faktor penyebab yang paling signifikan adalah persoalan kekuasaan (Anang, Makalah, Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang).

Fowler (1985:61) mengemukakan bahwa kuasa merupakan kemampuan seseorang atau institusi dalam mengontrol perilaku dan kehidupan material orang lain. Sementara itu, menurut Fairclough (1995:1) kekuasaan secara konseptual memiliki dua makna, yaitu (1) ketidaksimetrisan antarpartisipan dalam peristiwa-peristiwa wacana, dan (2) ketidaksamaan kapasitas dalam mengontrol bagaimana sebuah ujaran diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam konteks sosial budaya.

Dua pertanyaan dari Foucault terkait dengan kekuasaan perlu kita renungkan. Pertanyaan pertama, “apakah kekuasaan itu dan dari manakah asal kekuasaan.” Berbeda

dengan Marx yang memandang kekuasaan itu milik kelas penguasa atau borjuis, Foucault memandang kekuasaan bukan milik kelas penguasa. Kekuasaan adalah sebuah wilayah strategis, tempat terjadinya hubungan yang tidak setara antara si kuat dan si lemah: “di mana ada kekuasaan di situ ada perlawanan.” Ada hubungan yang asimetris antara penghasil teks dan konsumen teks. Rumusan lain menyebutkan bahwa kekuasaan adalah kekuatan dalam masyarakat yang membuat tindakan terjadi sehingga dengan menelitinya kita dapat mengenali siapa yang mengendalikan apa dan demi kepentingan siapa.

Perlu ditekankan bahwa dalam pandangan Foucault kekuasaan tidaklah melulu —atau tidak boleh selalu— dianggap sebagai sarana negatif, sesuatu yang menolak, sesuatu yang menekan, sesuatu yang menegaskan, sebaliknya kekuasaan adalah sesuatu yang produktif. Foucault memaparkannya sebagai berikut,

“Kita harus menghentikan penggambaran kekuasaan dan pengaruhnya sebagai sesuatu yang negatif: membuang, menekan, memberangus, menyensor, dan abstrak: menutupi, dan menyembunyikan. Kita harus mulai menggambarkan bahwa kekuasaan itu produktif: menciptakan, menghasilkan, dan melahirkan realitas, wilayah objek, dan ritual kebenaran.”

Pertanyaan yang kedua adalah, “*bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan bagaimana pengaruhnya*”. Jika pertanyaan ini dikaitkan dengan wacana politik, misalnya, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah, bagaimana pemerintah atau rezim yang berkuasa atau partai politik menjalankan kekuasaannya dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat atau konstituennya. Dalam negara demokrasi, kita sebagai warga negara memberikan hak kepada para elite politik untuk membuat hukum atas nama kita dan apabila kita melanggar hukum tersebut, maka kita akan dihukumnya. “Kekuasaan politik” mengendalikan berbagai aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti besarnya pajak yang harus kita bayar, besarnya biaya pendidikan yang harus kita bayar, dan sebagainya.

Jika pertanyaan ini dikaitkan dengan wacana jurnalistik, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah, bagaimana redaktur surat kabar sebagai kepanjangan pemilik modal menjalankan kekuasaannya dalam relasinya dengan pembaca dan bagaimana pengaruh cara pandang redaktur terhadap pembacanya. Jika pertanyaan ini dikaitkan dengan wacana jender, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah bagaimana super-ordinat relasi jender —yang pada umumnya adalah laki-laki— menjalankan kekuasaannya dan bagaimana pengaruh super-ordinat laki-laki terhadap perempuan (Anang, Makalah, Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang).

### **Analisis Wacana Kritis (AWK)**

Analisis wacana kritis (AWK) menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral dan bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Bahasa tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri pembicara. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, analisis wacana digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam proses bahasa, batasan yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang harus digunakan, dan topik yang dibicarakan (Fairclough, dalam Eriyanto, 2010:6). Melalui bahasa, kelompok sosial yang saling bertarung dan mengajukan kebenaran menurut versinya, masing-masing dapat dipelajari.

#### **a) Karakteristik Analisis Wacana Kritis (AWK)**

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami semata-mata sebagai kajian bahasa. Analisis wacana kritis memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Hasilnya bukan untuk memperoleh gambaran dari aspek kebahasaan, melainkan menghubungkannya dengan konteks. Hal ini berarti bahwa bahasa dipergunakan untuk tujuan dan praktek tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Dari kajian terhadap pandangan-pandangan van Dijk, Fairclough, dan Wodak Wodak (dalam Eri-

yanto, 2010:8-13) dapat dirumuskan sejumlah karakteristik analisis wacana kritis berikut.

- Wacana sebagai Tindakan

Dalam padigma kritis, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Wacana adalah bentuk interaksi. Wacana tidak ditempatkan dalam ruang yang tertutup dan internal. Tidak ada wacana yang vakum sosial. Hal ini mengandung dua implikasi. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, membujuk, menyanggah, mempersuasi. Seseorang yang berbicara atau menulis selalu mempunyai tujuan, besar atau kecil. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. Tidak ada wacana yang lahir tanpa disadari sepenuhnya oleh penutur atau pembicaranya.

- Peran Konteks dalam Produksi dan Interpretasi Wacana

Dalam paradigma kritis, wacana diproduksi, dimengerti, dan ditafsirkan dalam konteks tertentu. Dalam analisis wacana, selalu ditanyakan: (i) siapa yang mengkomunikasikan, mengapa dan dengan siapa, (ii) khlayak atau komunitasnya seperti apa dan bagaimana situasinya, (iii) melalui medium apa, (iv) bagaimana perbedaan tipe dari komunikasi yang berkembang, dan (v) bagaimana hubungan tiap-tiap partisipan. Bahasa dipahami dalam konteks secara keseluruhan. Tiga istilah ( teks, konteks, dan wacana) menjadi kata-kata kunci dalam AWK. Wacana adalah teks dalam konteks. Titik perhatian analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Bahasa selalu berada dalam konteks. Tidak ada tindakan komunikasi tanpa partisipan, antar-teks, situasi, dan sebagainya.

- Wacana sebagai Produk Historis

Dalam paradigma kritis, wacana ditempatkan dalam konteks kesejarahan tertentu. Wacana selalu berada pada ruang waktu tertentu dan akan selalu berhubungan dengan waktu lainnya. Analisis terhadap bahasa politik pasca Orde Baru akan selalu mempertanyakan (i) bagaimana situasi politik yang sedang

terjadi, (ii) mengapa wacana tertentu itu yang berkembang, dan sebaliknya mengapa wacana yang lain tidak berkembang, (iii) mengapa istilah reformasi dan reformis begitu berkembang serta memperoleh nilai positif, dan mengapa istilah *status quo* menjadi bernilai jelek dan memperoleh apresiasi negatif, dan sebagainya.

- Wacana sebagai Perebutan Kekuasaan

Dalam paradigma kritis, setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Wacana sesepel apapun adalah bentuk pertarungan kekuasaan itu. Dengan demikian, setiap analisis wacana yang muncul selalu dikaitkan dengan dimensi kuasa itu. Tugas para analis yakni mengkritisi kekuasaan yang tersembunyi dalam teks-teks bahasa itu.

- Wacana sebagai Praktik Ideologi

Dalam pandangan kritis, wacana dipandang sebagai praktik ideologi, atau pencerminan dari ideologi tertentu. Ideologi yang berada di balik penghasil teksnya akan selalu mewarnai bentuk wacana tertentu. Penghasil teks yang berideologi liberalisme atau sosialisme tentu akan menghasilkan wacana yang memiliki karakter sendiri-sendiri. Dua catatan penting yang berkenaan dengan ideologi dalam wacana. Pertama, ideologi secara inheren bersifat sosial, tidak personal atau individu. Ideologi akan selalu membutuhkan anggota kelompok, komunitas, atau masyarakat yang mematuhi dan memperjuangkan ideologi itu. Kedua, ideologi digunakan secara internal di antara anggota kelompok atau komunitas. Ideologi selalu menyediakan jawaban tentang identitas kelompok.

Dari paparan singkat itu dapat diperoleh pemahaman bahwa analisis wacana tidak bisa lagi menempatkan bahasa dalam sistem tertutup, tetapi harus menempatkannya dalam konteks. Analisisnya akan selalu mengungkap bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada, berperan dalam membentuk wacana (Anang, 2006:60-62).

## b) Pendekatan Analisis Wacana Kritis

Ada beberapa pendekatan dalam analisis wacana kritis, yaitu: pendekatan linguistik kritis, pendekatan Perancis, pendekatan kognisi sosial, pendekatan perubahan sosial, pendekatan kesejarahan. Pendekatan linguistik kritis menekankan analisisnya pada bahasa dalam kaitannya dengan ideologi (Eriyanto, 2006). Dalam hal ini, ideologi ditelaah dari sudut pilihan kata dan struktur kalimat yang digunakan. Pendekatan Perancis berasumsi bahwa bahasa adalah medan pertarungan kekuasaan (Rusdiati, 2003). Melalui makna yang diciptakan dalam wacana, berbagai kelompok saling berupaya menanamkan keyakinannya dan pemahamannya kepada kelompok lain. Melalui kata dan makna yang diciptakan mereka melakukan pertarungan, termasuk kekuasaan untuk menentukan dan mengukuhkan posisi dominasi kuasa pada yang lain. Pendekatan kognisi sosial merupakan faktor penting dalam produksi wacana (Van Dijk, 1997). Oleh karena itu, menurut pendekatan ini analisis wacana dapat digunakan untuk mengetahui posisi sosial kelompok-kelompok penguasa/dominan dan kelompok marginal. Selanjutnya, menurut pendekatan perubahan sosial wacana dipandang sebagai praktik kekuasaan (Bourdieu, 1994, Rusdiarti, 2003, dan Fashri, 2007). Menurut pendekatan ini wacana mempunyai tiga efek dalam perubahan sosial, yaitu (a) memberi andil dalam mengkonstruksi identitas sosial dan posisi subjek, (b) memberi kontribusi dalam mengkonstruksi relasi sosial, (c) memberi kontribusi dalam mengkonstruksi sistem pengetahuan dan kepercayaan (Fairclough, 1997;73-64). Selanjutnya, menurut pendekatan kesejarahan, analisis wacana harus memperhatikan konteks kesejarahan.

### Media dalam Paradigma Wacana Kritis

Menurut pandangan kritis media bukanlah entitas yang netral, tetapi bisa dikuasai oleh yang dominan. Media dipenuhi oleh prasangka, retorika, dan propaganda. Paradigma tersebut yakin bahwa media adalah sarana bagi kelompok dominan (yang kuasa) untuk mengontrol kelompok yang tidak dominan (dikuasai) dan memarginalkan mereka dengan menguasai dan mengontrol media. Media di sini dipandang sebagai arena perang antar kelas. Ia adalah sarana diskusi publik, yang masing-masing kelompok

sosial tersebut saling bertarung, saling menyajikan perspektif dengan cara memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan. Targetnya adalah pandangannya dapat diterima oleh publik (Eriyanto, 2011:38).

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran tentang bentuk, strategi, dan dampak pertarungan kekuasaan dalam Koran 'Jawa Pos' terkait dengan kasus Mesuji dan sekitarnya digunakan analisis wacana kritis (AWK) model Fairclough (1996:58). AWK model Fairclough mencakup tiga dimensi, yaitu teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosio-budaya. Selanjutnya proses analisisnya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (a) deskripsi, yakni analisis teks yang dicurigai mengandung pertarungan kekuasaan, baik yang berupa bentuk maupun strategi, (b) penafsiran, yakni mengaitkan bentuk dan strategi pertarungan kekuasaan dengan proses produksi dan penerimaan informasi bias yang disampaikan oleh teks berita, dan (c) penjelasan, yakni mengaitkan hasil penafsiran pertarungan kekuasaan yang ditemukan dalam teks berita dengan konteks sosio budaya media masa sehingga diperoleh penjelasan yang utuh dan mendalam tentang pertarungan kekuasaan.

Mengingat keterbatasan kajian dan waktu, dalam analisis teks koran 'Jawa Pos' yang memuat kasus Mesuji dan sekitarnya difokuskan pada tingkat tata bahasa. Menurut Fairclough (1996:58) analisis pada tingkat tata bahasa ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu proses atau partisipan. Dalam bentuk proses: seseorang, kelompok, atau kegiatan, ditampilkan sebagai: tindakan, peristiwa, keadaan atau proses mental.

Bentuk tindakan menggambarkan aktor melakukan tindakan tertentu kepada seseorang yang menyebabkan sesuatu. Dalam bentuk tindakan, anak kalimat biasanya berstruktur transitif (subjek + verba + objek). Contoh, 'Oknum polisi memperkosa wanita'.

Sedangkan bentuk peristiwa biasanya memasukkan satu partisipan (subjek atau objek saja). Contoh, 'seorang Oknum polisi melakukan pemerkosaan' (menghilangkan objek). 'Seorang wanita mengalami pemerkosaan' (menghilangkan subjek). Selain itu, bentuk peristiwa cenderung mempunyai anak kalimat intransitif (subjek + verb). Bentuk keadaan, menunjuk sesuatu yang telah terjadi. Misalnya, 'mahasiswa

terbunuh'. Hanya menggambarkan keadaan, tanpa menyebut dan bisa menyembunyikan subjek pelaku. Sementara itu bentuk proses mental, menampilkan sesuatu sebagai fenomena umum, yang membentuk kesadaran khalayak tanpa menunjuk pelaku subjek dan korban secara spesifik. Misal, 'Pemeriksaan terjadi di mana-mana'.

Selanjutnya, bentuk partisipan cenderung menampilkan aktor dalam teks, apakah aktor ditampilkan sebagai pelaku atau korban. Pelaku biasanya ditampilkan dalam bentuk kalimat aktif, aktor melakukan sesuatu yang menyebabkan sesuatu pada objek/seseorang. Sementara itu, korban menunjuk pada sesuatu yang disebabkan oleh orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, ada dua strategi wacana, yaitu diwujudkan dalam bentuk kalimat pasif, yang pelakunya dapat disembunyikan dan diwujudkan dalam bentuk nominalisasi, yakni ditampilkan bentuk kegiatan tanpa menunjuk partisipan atau pihak terkait. Contoh, 'kemiskinan penduduk perkotaan sudah pada tingkat mengkhawatirkan'. Kalimat ini menunjukkan gejala atau keadaan miskin dengan menampilkan objek 'rakyat miskin' tanpa menunjukkan apa atau siapa yang menyebabkan kemiskinan.

Setelah analisis teks dari aspek tata bahasa, dilanjutkan dengan analisis praktik kewacanaan, yakni menafsirkan hasil deskripsi teks dengan konteks produksi dan penerima teks. Selanjutnya, dilakukan analisis sosio budaya, yakni penjelasan dengan mengaitkan hasil penafsiran pertarungan kekuasaan yang ditemukan dalam teks berita dengan konteks sosio budaya media massa sehingga diperoleh penjelasan yang utuh dan dalam tentang pertarungan kekuasaan.

#### **Pertarungan Kekuasaan dalam Media Cetak (analisis tata bahasa, analisis praktik wacana, dan analisis sosio-budaya pada teks media-cetak 'Jawa Pos')**

Pada awal muncul kasus Mesuji dan sekitarnya, media cetak Jawa Pos tanggal 15 Desember 2011 mengangkat berita dengan judul 'Pembantaian Dua Tahun, 30 Tewas'. Judul yang ditulis dalam bentuk partisipan dengan strategi nominalisasi menampilkan keadaan dan objek/korban, tetapi tidak menunjukkan siapa aktor yang melakukan pembantaian. Hal ini me-

nunjukkan proses pembuatan teks ini belum ada gambaran yang jelas siapa sebenarnya yang melakukan pembantaian itu. Di samping itu, sebagai pengelola berita tentu sangat berhati-hati dalam memuat berita yang sangat sensitif dan spektakuler di Indonesia akhir-akhir ini.

Pada bagian berikutnya, terdapat berita 'Menurut data resmi yang dicatat YLBHI, serangkaian kekerasan tersebut berlangsung dengan beking aparat'. "Kami mendesak Kapolri bertanggung jawab langsung atas hal ini", tegasnya. Teks yang berasal dari pemilik berita (YLBHI) dikutip apa adanya oleh pengelola media, Jawa Pos'. Jika dicermati teks tersebut disusun dalam bentuk partisipan dengan strategi menampilkan pelaku. Hal tersebut mengindikasikan adanya keyakinan YLBHI terhadap kebenaran kasus Mesuji dan sekitarnya. Dengan demikian, YLBHI juga ingin menunjukkan 'kekuasaan' warga Mesuji dan sekitarnya terkait dengan kasus yang sedang terjadi.

Namun, *press-release* YLBHI tersebut ditolak oleh Kapolri dengan strategi menghindar, yang diwujudkan dalam teks berita berbentuk partisipan dengan strategi nominalisasi dan bentuk keadaan, yakni hanya menggambarkan keadaan tanpa menunjuk pelaku, bahkan strategi pengingkaran. Seperti dalam teks berita berikut. 'Kapolri Timur Pradopo mengatakan, ada dua kejadian yang ditangani Polri terkait dengan pembantaian Mesuji'. 'Terkait dengan kejadian di wilayah Mesuji – Lampung, Kapolri mengatakan adanya masyarakat yang disandera oleh masyarakat'. 'Jika memang benar ada pembunuhan sadis hingga 30 orang, Sutarman berjanji menindak tegas. "Menurut saya itu berlebihan". Bahkan, pada *head-line* Jawa Pos 16 Desember 2011 tertulis dengan jelas 'Polri Tepis Pembantaian Mesuji'.

Berdasarkan beberapa teks kalimat Kapolri dan Sutarman (Kabareskrim) tersebut, mengindikasikan adanya 'sesuatu' yang ditutupi oleh Polri, baik terkait dengan pelaku pembantaian maupun jumlah korban yang sebenarnya. Idealnya, institusi ini harus mengetahui dengan pasti pelaku dan korban pembantaian.

Pada sisi lain, warga Mesuji dan sekitarnya yang didampingi penasihat hukum dari YLBHI melaporkan kasus pembantaian di Mesuji kepada DPRRI dan beberapa kali

menyampaikan kepada masyarakat melalui konferensi pers. Dalam memperkuat laporannya, warga beserta penasihat hukum menyampaikan video sadis pembantaian di Mesuji. Hal ini menunjukkan adanya upaya membangun opini publik tentang adanya 'kuasa' masyarakat Mesuji terhadap kasus yang dihadapi. Teks 'video pembantaian sadis' dikemas dalam bentuk keadaan, menggambarkan keadaan tanpa menyebutkan partisipan (pelaku dan objek/korban), sehingga menimbulkan kesan keraguan terhadap kebenaran isi video. Dengan demikian, pembuatan video itu merupakan strategi membangun opini pada publik, sekaligus membangun 'kekuasaan' atas kasus Mesuji dan sekitarnya.

Terkait dengan pembantaian Mesuji yang dimuat dalam Jawa Pos pada tanggal 19 Desember 2011' tersebut Mabes Polri meyakini video itu memang tidak orsinil'. "Ada tiga wajah yang bisa dikenali dalam video itu. Salah seorang di antaranya kami duga adalah perekamnya. Ini sudah kami cetak untuk kami laporkan pada pimpinan". Jika dianalisis ketatabahasaannya, kalimat-kalimat dalam teks tersebut berbentuk tindakan dengan struktur lengkap (subjek + verba + objek). Dengan demikian, tidak ada partisipan (pelaku atau objek) yang dilesapkan. Hal tersebut berarti tidak ada sesuatu yang disembunyikan, artinya Polri sangat yakin bahwa video itu tidaklah orsinil, sehingga tidak dapat menggambarkan kejadian yang sesungguhnya. Bentuk teks tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk memperkuat posisi/'kekuasaan' sebagai institusi penegak hukum di Indonesia.

Namun pada sisi lain, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menanggapi berbeda video yang berisi gambar pembantaian sadis itu. "TGPF akan menelusuri kebenaran video tersebut. TGPF tidak langsung menyimpulkan kebenaran sejumlah gambar dalam video itu" (Jawa Pos, 19 Desember 2011). Teks tersebut disusun dalam bentuk tindakan berstruktur lengkap (subjek + verb + objek). Hal ini menunjukkan tidak ada unsur partisipan (subjek atau objek) yang dilesapkan. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang ditutupi, artinya TGPF akan bersikap terbuka terhadap seluruh hasil yang ditemukan. Ini sesuai dengan keberadaan TGPF yang bertugas untuk mencari fakta yang sebenar-benarnya, yang kemudian digunakan pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijak-

an yang tepat dalam menangani kasus Mesuji.

Pada tanggal 21 Desember 2011 Jawa Pos menulis judul 'Pamswakarsa Lebih Galak daripada Brimob'. Jika dicermati bentuk teks ke-wacanaan, judul itu berbentuk partisipan dengan menampilkan aktor sebagai pelaku. Hal ini berarti pelaku menunjukkan sesuatu pada unsur lain, dalam hal ini verba. Dengan demikian, pelaku menunjukkan 'kekuasaan' yang lebih dominan dibandingkan dengan unsur lain. Ditinjau dari etimologis, pamswakarsa berasal dari pam singkatan pengamanan, dan swakarsa berarti kehendak sendiri; artinya pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk wilayahnya sendiri. Dengan demikian, pamswakarsa yang dibuat oleh perusahaan sebenarnya menyalahi konsep swakarsa; kecuali memang dibuat oleh perusahaan dengan maksud dan tujuan tertentu.

Pada tanggal 24 Desember 2011 Jawa Pos memuat berita kasus Mesuji dengan judul 'Tiga Polisi Terlibat'. Jika dicermati bentuk teks ke-wacanaannya, judul itu berbentuk partisipan dengan menampilkan aktor sebagai pelaku. Hal ini menunjukkan pembuktian, bahwa dalam beberapa siaran pers sebelumnya Kapolri menyangkal ada anggota polisi yang terlibat dalam kasus Mesuji. Apalagi hal ini disampaikan oleh TPGF, sehingga Kapolri mengakui bahwa ada anggotanya yang terlibat dalam kasus Mesuji dan sekitarnya.

### **Pihak dalam Pertarungan Kekuasaan**

Berdasarkan analisis teks, paraktik wacana, sekaligus praktik sosial yang dilakukan secara simultan pada teks berita koran Jawa Pos tersebut dapat kemukakan bahwa pihak yang terlibat dalam pertarungan 'kekuasaan' meliputi pengelola media, Jawa Pos, Polri, masyarakat Mesuji, dan TPGF. Hal ini karena Jawa Pos sebagai pengelola, selain memproduksi sendiri berita yang mengangkat kasus Mesuji, juga mengutip langsung dari pemilik berita atau sumber berita, yaitu dari Polri, masyarakat Mesuji, dan TPGF. Masing-masing lembaga tersebut, mengeluarkan siaran pers yang merupakan hasil konstruksi dari realitas, versi mereka masing-masing. Dengan demikian, Jawa Pos lebih dominan sebagai penyedia arena pertarungan kepentingan dan kekuasaan di antara mereka. Hal

ini sesuai dengan pendapat Gramsci (1971 dalam Al zastrouw, 2000). Bagi Gramsci media merupakan arena pertarungan ideologi yang saling berkompetisi. Hal ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, sekaligus menjadi kontrol wacana publik. Namun, pada sisi lain media juga bisa menjadi alat resistensi pada kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus bisa juga menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

### **Bentuk Pertarungan Kekuasaan**

Bentuk pertarungan kekuasaan, oleh para pihak yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan, adalah berbeda-beda. Bentuk kekuasaan Jawa Pos lebih mengarah pada kekuatan dalam menghadirkan pihak yang saling bertentangan dalam kasus Mesuji, yaitu warga masyarakat dengan penasihat hukumnya dan Polri sebagai pihak yang 'merasa' terpojokkan. Di samping itu, Jawa Pos juga menghadirkan pihak ketiga, yaitu TPGF yang mengemban misi pemerintah yang dapat menampilkan bukti-bukti untuk penyelesaian kasus Mesuji. Hal tersebut terbukti dari berita yang dimuat sebagian besar berupa kutipan langsung dari pemilik berita, warga masyarakat Mesuji, Polri, dan TPGF.

Bentuk kekuasaan Polri yang ditonjolkan dalam teks berita Jawa Pos adalah bentuk keadaan atau proses mental bahwa lembaga Polri merupakan lembaga hukum yang merasa paling bertanggung-jawab dalam masalah ketertiban dan keamanan, tidak bisa diintervensi pihak mana pun, sehingga Polri selalu menghindar dan bahkan mengingkar ketika ada sinyalemen keterlibatan Polri dalam kasus Mesuji.

Bentuk kekuasaan warga masyarakat yang ditekankan dalam teks berita Jawa Pos adalah perjuangan dari masyarakat Mesuji dalam menuntut pihak-pihak yang melakukan kekerasan dan pembunuhan dan perjuangan untuk penguasaan lahan yang pernah dihuni kemudian diambil alih oleh perusahaan. Dengan demikian motif kepentingan 'kekuasaan' terbukti sangat kuat. Di samping itu, bentuk kuasa TPGF adalah pengemban misi

pemerintah dalam menyelesaikan kasus Mesuji, sehingga TPGF sangat akomodatif tetap tidak mungkin bisa diintervensi oleh pihak mana pun.

### **Strategi Pertarungan Kekuasaan**

Perbedaan bentuk pertarungan kekuasaan tersebut berpengaruh pada strategi pertarungan kekuasaan. Strategi pertarungan kekuasaan itu terwujud dalam strategi keterwacanaan dalam teks berita Jawa Pos terkait dengan kasus Mesuji dan sekitarnya. Strategi yang digunakan oleh Jawa Pos adalah dengan membuat judul berita yang dikemas dalam bentuk partisipan dengan strategi nominalisasi menampilkan keadaan dan objek. Hal ini menunjukkan proses pembuatan teks ini belum ada gambaran yang jelas siapa sebenarnya yang melakukan pembantaian itu. Di samping itu, sebagai pengelola berita tentu sangat berhati-hati dalam memuat berita yang sangat sensitif dan spektakuler pada akhir-akhir ini di Indonesia. Di samping itu, Jawa Pos membuat judul yang berbentuk partisipan dengan menampilkan aktor sebagai pelaku dan teks ini berasal dari TPGF. Kedua hal itu merupakan strategi Jawa Pos dalam menunjukkan kuasanya sebagai penyedia arena pertarungan kekuasaan bagi pihak terkait.

Strategi pertarungan kekuasaan yang dilakukan oleh Polri adalah strategi menghindar dan mengingkar yang diwujudkan dalam teks berita berbentuk partisipan dengan strategi nominalisasi dan bentuk keadaan, yakni hanya menggambarkan keadaan tanpa menunjuk pelaku, bahkan strategi pengingkaran. Seperti dalam teks berita 'Kapolri Timur Pradopo mengatakan, ada dua kejadian yang ditangani Polri terkait dengan pembantaian Mesuji'. 'Kapolri mengatakan, ada masyarakat yang disandera oleh masyarakat'. 'Jika memang benar ada pembunuhan sistematis hingga 30 orang, Sutarman berjanji menindak tegas. "Itu saya kira berlebihan". 'Polri Tepis Pembantaian Mesuji'.

Selanjutnya, strategi pertarungan yang dilakukan oleh masyarakat Mesuji melalui penasihat hukumnya adalah dengan press liris yang diberi label teks 'video pembantaian sadis'. Label ini dikemas dalam bentuk keadaan, yakni menggambarkan keadaan tanpa menyebutkan partisipan (pelaku dan objek/korban), sehingga menimbulkan kesan

keraguan terhadap kebenaran isi video. Dengan demikian, pembuatan video itu merupakan strategi membangun opini pada publik, sekaligus membangun 'kekuasaan' atas kasus Mesuji dan sekitarnya.

Sementara itu, strategi pertarungan kekuasaan TPGF adalah dengan menyusun teks berita berbentuk tindakan berstruktur lengkap (subjek + verb + objek). Hal ini menunjukkan tidak ada unsur partisipan (subjek atau objek) yang dilesapkan. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang ditutupi, artinya TPGF akan bersikap terbuka terhadap seluruh hasil yang ditemukan.

### Simpulan

Berdasarkan analisis teks berita Jawa Pos yang memuat kasus Mesuji dan sekitarnya melalui analisis ketatabahasaan, praktik kewacanaan, dan praktik sosio budaya secara simultan dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Terdapat pertarungan kekuasaan oleh pihak terlibat dalam pemberitaan kasus Mesuji dan sekitarnya, yakni Jawa Pos, Polri, masyarakat Mesuji dan sekitarnya, dan TPGF.
- Bentuk pertarungan kekuasaan di antara keempat pihak tersebut berbeda-beda. Jawa Pos memiliki kuasa atau kekuatan dalam menghadirkan pihak yang saling bertentangan dalam kasus Mesuji. Bentuk kekuasaan Polri adalah lembaga hukum yang merasa paling bertanggung jawab terhadap masalah ketertiban dan keamanan tidak mau diintervensi oleh pihak mana pun.
- Bentuk kekuasaan warga masyarakat adalah perjuangan menuntut pihak-pihak yang melakukan pembunuhan dan perjuangan untuk penguasaan lahan. Sementara itu, bentuk kuasa TPGF adalah pengembanan misi pemerintah dalam penyelesaian kasus Mesuji.
- Strategi pertarungan kekuasaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga berbeda-beda. Jawa Pos dengan strategi kewacanaan yang memiliki pola partisipan dengan strategi nominalisasi menampilkan keadaan dan objek. Polri dengan strategi kewacanaan dan pola partisipan serta strategi nominalisasi dan bentuk keadaan, hanya menggambarkan keadaan, dengan tanpa menunjuk pelaku.

Masyarakat Mesuji dengan strategi kewacanaan yang berpola keadaan, yang menggambarkan keadaan tanpa menyebutkan partisipan (pelaku dan objek/korban). Sementara itu, TPGF dengan strategi kewacanaan yang berpola tindakan, dengan struktur lengkap (subjek + verb + objek).

### Saran

Hasil analisis wacana teks berita media berdasarkan ketatabahasaan yang dilanjutkan dengan analisis praktik kewacanaan dan sosio budaya secara simultan tentu hasilnya sangat kurang komprehensif. Untuk itu, perlu dilanjutkan dengan analisis melalui dimensi analisis yang lebih lengkap, yakni pada dimensi teks (aspek kosa-kata, gramatika, dan struktur teks), praktek kewacanaan, dan praktik sosio budaya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Fairclough.

---ooOoo--

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zastrouw Ng.2000. "Membaca Berita yang tidak Diberitakan" dalam Winarko,H. *Mendeteksi Bias Berita: Panduan untuk Pemula*.Yogyakarta: Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIKOR) untuk Garda Bangsa, hlm. v-xii.
- Bennett, Tony; etc. (ed.) 1982. *Culture, Society, and The Media*. London: Methuen.
- Dan Wodak, Ruth. 1997. "Critical Discourse Analysis" dalam Teun Van Dijk (ed.) *Discourse as Sosial Interaction: Discourse Studies a Multidisciplinary Introduction*, Vol 2. London: Sage Publication.
- Eriyanto, 2005. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Cetakan ke-4, Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, Norman. 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Hall, Stuart. 1982. "The Discovery of Ideology: The Return of the Repressed in Media Studies, Culture Society, and Media". London: Methuen.
- Hidayat; Dedy N. 1999. "Politik Media, Politik Bahasa Dalam Proses Legitimasi dan

- Delegitimasi Rejim Orde Baru”, artikel dalam Sandra Kartika dan M. Mahendra (Ed), *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman; Wacana Multikultural Dalam Media*, Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Rusdiarti, Suma Riella. 2003. Bahasa, Pertarungan Simbolik, dan Kekuasaan. *Basis VII* (11-12):31-40.
- Santoso, Anang. 2006. *Bahasa, Masyarakat, dan Kuasa: Topik-topik Kritis dalam Kajian Ilmu Bahasa*. Malang: Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang.
- Sobur, Alex. 2009. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Sudibyo, A. Hamad, I, Qodari, M. 2001. *Kabar-kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
- Van Dijk. 1997. ‘Discourse as Interaction in Society’, Vol 2 London: Sage Publication.
- . 2011. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Cetakan ke-IX, Yogyakarta: LKiS.
- . 2005. “Critical Discourse Analysis and The Marketization of Public Discourse: The Universities”, dalam *Critical Discourse Analysis*, London and New York, Longman, 1998 dalam Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* Cetakan ke-4, Yogyakarta: LKiS